KILAS

Pemerintah Rilis Regulasi Anyar PPnBM Mobil Listrik

PERSPEKTIF

Fokus Jaga *Collection*dan Arus Kas

www.ifsa.or.id



MULTIFINANCE





Rapindo tanpa dukungan Perusahaan Pembiayaan dan Bank tidak akan berfungsi optimal. Mitigasi resiko terhadap *double pledge* akan maksimal dilakukan bila semua *stake holder* terlibat aktif.

Ayo bergabung segera ke Rapindo untuk lebih menyehatkan industri pembiayaan di tanah air tercinta. Apalagi dukungan dari OJK sudah ada berupa **POJK No 47 tahun 2020 pada pasal 16.**

YUK BURUAN JOIN RAPINDO

LEMBAGA PENCATATAN ASET









PT. Rapi Utama Indonesia Kota Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870 T. 021 2283 6019

E. info@rapindo.co.id

Apply For Membership







Free Prepaid Voucher 15 t

Penawaran Hingga

30 Sept 2021

*T & C Applied

Seberapa Baik Anda Dalam Mengenali Calon Pelanggan?

CONFINS.R3 kini terhubung dengan PROFIND

PROFIND akan membantu proses verifikasi data calon pelanggan secara digital.

ad-ins.com

Digitalisasi KYC dan Proses Aplikasi

Kami mengotomatisasi proses verifikasi informasi personil, alamat, dan pendapatan.

Menggunakan Data Alternatif

Memanfaatkan data digital dari calon pelanggan Anda.

Penggunaan Akun Transaksi Harian

Titik-titik alamat, telepon ring-1, pengeluaran bulanan, pengeluaran perjalanan, pendapatan, dan masih banyak lagi.

Dilengkapi dengan **Dashboard dan Skor Profile Pelanggan**



PT. Adicipta Inovasi Teknologi

Adins Official in PT. Adicipta Inovasi Teknologi

marketing@ad-ins.com

People Make IT Work



DAFTAR ISI



Sambutan

Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI Mari Bekerja Sama Hadapi Pandemi

13 Profil

Tetsushi Tanaka, Ketua Bidang Hubungan Joint Venture APPI Bisnis Multifinance di Indonesia Prospektif

17 Kilas

- Daya Saing SDM Perlu Disiapkan
- Pemerintah Rilis Regulasi Anyar PPnBM Mobil Listrik
- Eksekusi Barang Jaminan Tak Bisa Sembarangan
- Perusahaan Pembiayaan Tidak Merampas Kendaraan
- Bunga Kredit Turun Tak Dorong Permintaan di Masa Pandemi

22 Perspektif

- Prospek Perusahaan Pembiayaan Fokus Jaga Collection dan Arus Kas
- Penerbitan Obligasi Perusahaan Pembiayaan Masih Dominan
- Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara Pertumbuhan Ekonomi Bertumpu di Pengendalian Covid-19

29 Lensa

Vaksinasi Dosis Ke-2 Covid-19 Bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

- 31 Forum Komunikasi Daerah (FKD)
- 34 Daftar Anggota APPI

Dapatkan Souvenir menarik dari APPI bagi yang menuliskan artikel dalam majalah Multifinance. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai informasi ini, dapat menghubungi Sekretariat APPI di Telp. (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id



Surat Pembaca

Pemimpin Umum: Suwandi Wiratno

Penanggung Jawab:

Sigit Sembodo Rosalina Dhanudimuljo Gusti Wira Susanto Roni Haslim Hafid Hadeli Andreas Manik Tetsushi Tanaka

Pemimpin Redaksi:

Sri Haryati

Sekretaris Redaksi:

Wellyani Daniel Darmadi

Sirkulasi/Distribusi:

Sekretariat APPI

ALAMAT REDAKSI:

Kota Kasablanka (EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D email: sekretariat@ifsa.or.id website: www.appi.id Telp: 021-2982 0190 Fax: 021-2982 0191

Svarat Menarik Kendaraan

Dalam media sosial yang lalu kita sering dihebohkan dengan video yang menyatakan bahwa kendaraan konsumen di rampas oleh debt collector, padahal setelah di teliti lebih lanjut yang sering terjadi adalah debitur membawa kabur kendaraan atau menjual kendaraannya yang sudah menunggak. Mohon Majalah Multifinance bisa membahas mengenai syarat dokumen yang harus dipenuhi agar debt collector tidak lagi dituntut merampas kendaraan

Yeremias Anos,

Ambon

Terima kasih, pada majalah edisi bulan Agustus 2021, telah dibahas mengenai persyaratan eksekusi kendaraan dari Humas Polri RI, Red

Vaksinasi Pembiayaan

Karena kondisi Covid-19 yang semakin meluas, mohon bantuan Majalah Multifinance bisa membantu menginformasikan kegiatan vaksinasi yang ada di lingkungan perusahaan pembiayaan, sehingga kami tidak akan kesulitan saat mau melakukan vaksinasi untuk karyawan maupun debitur.

Yudi Kurniawan,

Pekalongan

Terima kasih kegiatan vaksinasi di industri pembiayaan telah dilaksanakan beberapa kali. Untuk kegiatan vaksinasi di Jakarta telah dilaksanakan oleh APPI dan untuk kegiatan vaksinasi di daerah dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Daerah melalui FKIJK dari Otoritas Jasa Keuangan. Informasi vaksinasi dapat dilihat melalui rubrik lensa Majalah Multifinance, Red

SAMBUTAN

Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Mari Bekerja Sama Hadapi Pandemi

rospek ekonomi dan masa depan dunia usaha di Indonesia ditentukan oleh kemampuan semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri jasa keuangan dalam menyelesaikan isu-isu yang terkait dengan kesehatan.

Ikhtiar bersama tentu menggantungkan harapan agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir. Hanya saja, itu semua membutuhkan kerja sama semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha, *stakeholders*, dan masyarakat untuk taat dengan protokol kesehatan.

Satu sisi, upaya mempercepat program vaksinasi terus dilakukan, termasuk oleh pelaku industri pembiayaan untuk menjamin kesehatan para karyawan, keluarga, dengan harapan mampu memutus rantai penyebaran Covid-19.

Meski situasi masih diselimuti ketidakpastian akibat penyebaran Covid-19, pelaku usaha pembiayaan tidak berhenti bekerja. Adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bukan lantas membuat kita semua berhenti bekerja.

Walaupun sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air pada tahun lalu, industri pembiayaan terpukul. Namun awal tahun 2021 data yang ada menunjukkan industri sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja. Didukung oleh relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) atas kendaraan bermotor Maret 2021.

Dalam Seminar APPI dengan mengambil tema Cross Industry Collaboration for Multifinance kunci untuk bisa menjaga bisnis tumbuh di saat ini adalah dengan melakukan kolaborasi dan membangun satu tim kerja bersama dengan industri jasa keuangan lainnya.

Harus diakui, Kerjasama ini akan membuka peluang bagi industri untuk bertumbuh. Peluang kerjasama dengan bank perkreditan rakyat (BPR) dan bisnis *peer-to-peer* (P2P) *lending* sangat terbuka. Demikian pula peluang pendanaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Situasi saat ini memang tidak mudah. Perusahaan pembiayaan perlu melakukan terobosan sehingga akhirnya industri ini tetap mampu tumbuh dan memberi kontribusi besar terhadap ekonomi bangsa. (*)





PERUSAHAAN PEMBIAYAAN Intip Celah Kolaborasi

Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang masih dibayangi pandemi Covid-19, kelangsungan usaha khususnya oleh perusahaan pembiayaan membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak agar daya jangkau layanan kepada debitur tetap terjaga.

elain mengoptimalkan layanan berbasis digital, kolaborasi dengan berbagai entitas di industri jasa keuangan perlu ditingkatkan. Ruang pertumbuhan industri pembiayaan dinilai masih cukup terbuka dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dan model bisnis yang kolaboratif.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi mengatakan bahwa peran industri jasa keuangan, utamanya industri pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tetap dibutuhkan saat ini.

OJK menilai industri jasa keuangan di Tanah Air masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Indikator perekonomian seperti sektor rumah tangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan.

Dia menuturkan OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.

OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru.

Industri pembiayaan, mampu mengendalikan rasio pembiayaan bermasalah atau nonperforming financing (NPF) kendati situasi ekonomi masih dibayangi pandemi Covid-19. Hal itu tak lepas dari upaya restrukturisasi kredit oleh perusahaan pembiayaan.

FOKUS

Mengutip data OJK hingga berdasarkan data pengujung 28 Juni 2021, permohonan restrukturisasi yang diterima oleh 167 perusahaan mencapai 5,75 juta pembiayaan pembiayaan, dengan nilai outstanding pokok Rp180,92 triliun.

OJK bersama pemerintah terus melakukan langkah melakukan antisipasi untuk industri keuangan. Program restukturisasi mampu menekan NPF perusahaan pembiayaan. NPF perusahaan pebiayaan masih cukup terkendali dikisaran 4%," ujarnya saat memberikan keynote speech dalam Online Seminar APPI yang mengambil tema Cross Industry Collaboration for Multifinance yang berlangsung pada Selasa, 27 Juli 2021.

Menurutnya, program pemulihan ekonomi perlu terus didukung melalui percepatan vaksinasi. Peran industri jasa keuangan, kata Riswinandi dalam program vaksinasi akan terus ditingkatkan untuk menjamin kesehatan karyawan dan mendorong kekebalan komunal atau herd imunity.

"Kolaborasi dengan pemain industri keuangan untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi perlu terus ditingkatkan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia mencapai 1.498 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 76,5% di antaranya merupakan BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15 miliar.

Kemudian, sebanyak 273 BPR atau 18,3% memiliki modal inti antara Rp15 miliar-Rp50 miliar. Dan sisanya, sebanyak 78 BPR atau 5,2% memiliki modal di atas Rp50 miliar.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga April 2021, aset BPR tumbuh 6,27% menjadi Rp156.020 miliar dari yang sebelumnya Rp146.819 miliar.

Penyaluran kredit oleh BPR sampai April 2021 lalu mencapai Rp113.425 miliar, tumbuh 1,82% dibandingkan dengan penyaluran kredit pada April 2020 yang nilainya tercatat Rp111.403 miliar.

Indikator **BPR** pertumbuhan itu menggambarkan bisnis bank masih mampu tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Hanya saja, kata Joko satu hal yang patut dicermati adalah perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasar BPR cukup besar di segmen UMKM



Kolaborasi dengan pemain industri keuangan untuk membantu pemerintah mempercepat vaksinasi perlu terus ditingkatkan.

- Riswinandi,

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

sehingga potensi terdampak pandemi Covid-19 cukup tinggi, apabila aktivitas usaha masyarakat masih berjalan terbatas karena adanya PPKM.

Joko menyatakan situasi Covid-19 membuka peluang bagi perusahaan keuangan untuk terus berkolaborasi. BPR juga siap untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pembiayaan untuk memperluas pangsa pasar.

Peluang kerja sama melaui pola channeling maupun executing. Pola channeling, pinjaman dari BPR diteruskan oleh perusahaan pembiayaan sebagai kredit dengan risiko ditanggung oleh perusahaan pembiayaan.

Adapun pola executing, pinjaman oleh BPR diberikan kepada pelaku usaha melalui perusahaan pembiayaan sebagai mitra dengan risiko ditanggung oleh BPR. Hanya saja, perusahaan pembiayaan yang menjadi mitra BPR memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

"Pola kerja sama antara BPR dan perusahaan pembiayaan ini sudah kami lakukan. Kalau dilihat, cakupannya memang kredit modal kerja dan konsumsi yang paling dominan. Kerja sama dengan APPI dan perusahaan pembiayaan lebih ke consumer loan dan modal kerja baik itu konvensional maupun syariah," kata Joko.

Menurut Joko, skema kerja sama antara perusahaan pembiayaan dan BPR bisa juga terkait dengan joint financing. "Peluang itu sangat terbuka, nanti tinggal dibicarakan bagaimana mekanismenya. Pada prinsipnya, model itu bisa dilakukan," katanya.

Kerja sama BPR dan perusahaan pembiayaan setidaknya memberikan sejumlah keuntungan. Bagi perusahaan pembiayaan, misalnya akan memudahkan debitur dalam membayar angsuran karena jaringan BPR tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

Sementara itu, bagi BPR kerja sama itu bisa mendorong pendapatan berbasis nonbunga atau fee based income.

PENJAMINAN KREDIT

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelaksana I Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Dikdik Yustandi menyatakan sejak pandemi Covid-19, pemerintah membentuk jaring pengaman dan berbagai kebijakan agar dunia usaha bisa pulih dan kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

LPEI, katanya memiliki peran untuk melakukan penjaminan bagi pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas usaha, khususnya berorientasi ekspor untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai.

Sejak 2020, LPEI selaku lembaga keuangan khusus pelat merah atau special mission vehicles Kementerian Keuangan memberikan penjaminan atas kredit modal kerja yang disalurkan oleh



perbankan kepada pelaku usaha korporasi melalui program Penjaminan Pemerintah atau Jaminah.

Sekadar informasi, salah satu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini bertujuan mendongkrak pertumbuhan kredit perbankan, yang diharapkan mampu rebound selama periode 2021, ditopang oleh perluasan cakupan melalui Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.98/PMK.08/2020 menjadi PMK No.32/ PMK.08/2021.

Jaminah diharapkan dapat memberikan kepercayaan bagi perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja (KMK) baru atau tambahan kepada pelaku usaha korporasi.

Cakupan program itu mempertimbangkan masukan dan saran dari perbankan serta pelaku usaha berkaitan tujuh aspek. Pertama, jumlah tenaga kerja menjadi 100 orang atau 50 orang khusus untuk yang termasuk dalam sektor hotel, restoran, kafe, dan bioskop.

Kedua, nilai penjaminan dimulai dari minimal Rp5 miliar. Ketiga, tenor penjaminan sampai dengan 3 tahun dengan penerbitan terakhir 17 Desember 2021. Keempat, tanggungan IJP oleh pemerintah sebesar 80% (sampai dengan 31 Juli 2021) dan 70% (dimulai dari 1 Agustus 2021).

Selanjutnya, kelima, sektor prioritas yang dapat memperoleh coverage penjaminan sampai 80% bertambah menjadi 22 sektor. Keenam, definisi justifikasi Covid-19 yang diperjelas. Dan, ketujuh, kredit sindikasi/club deal dapat mengikuti program Jaminah.

Hingga Juni 2021, LPEI mengelola aset senilai Rp89,8 triliun dengan nilai pembiayaan senilai Rp90,2 triliun, dan garansi yang bersifat komersial maupun yang bersifat kegiatan pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp9,9 triliun.

Saat ini, kata Dikdik program Jaminah menggandeng 26 bank. "Jika perusahaan membutuhkan pembiayaan penjaminan dan sudah memiliki relasi dengan bank bisa didiskusikan dengan bank masing-masing," katanya.

Melalui Jaminah, Dikdik menuturkan langkah bank dalam melakukan mitigasi kepada debitur akan lebih terjamin. Fasilitas yang dijamin berupa kredit modal kerja atau tujuannya untuk mendukung modal kerja, pemerintah dapat

FOKUS

memberikan subsidi penjaminan.

"Paling penting bagi bank, jaminan pemerintah dapat dikecualikan dari BMPK [batas minimum pemberian kredit] dan ATMR [aset tertimbang menurut risiko]. Sepanjang penjaminan masih ada, kolektabilitasnya dianggap lancar. Dari sisi perbankan, dapat lebih nyaman memberikan pinjaman kepada pelaku usaha," katanya.

Besaran subsidi penjaminan, kata Dikdik terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama, subsidi 100% oleh pemerintah dengan plafon Rp5 miliar— Rp50 miliar. Klaster kedua, subsidi jaminan 100% dengan plafon Rp50 miliar—Rp300 miliar. Adapun klaster ketiga, 70% subsidi oleh pemerintah untuk plafon Rp300 miliar—Rp1 triliun yang berlaku Agustus—Desember 2021. Program sempat dibuka untuk subsidi sebesar 80% pada periode April—Juli 2021.

Alur pengajuan Jaminah, debitur mengajukan dokumen atau melakukan komunikasi dengan pihak perbankan. Kemudian bank akan menyampaikan dokumen kepada LPEI. Selanjutnya, LPEI akan meminta pihak ketiga (penilai) untuk mengukur kelayakan debitur yang akan menerima penjaminan. Apabila disetujui, LPEI menginformasikan kepada pihak bank untuk ditindaklanjuti debitur.

Bertindak sebagai penilai adalah PTP emeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui Pefindo Biro Kredit. Nantinya, lembaga pemeringkat akan memberikan rating kepada pelaku usaha dengan

skala penilaian risiko 1 hingga 4 untuk perusahaan yang berorientasi ekpsor dan penilaian risiko 1—3 untuk perusahaan nonekspor.

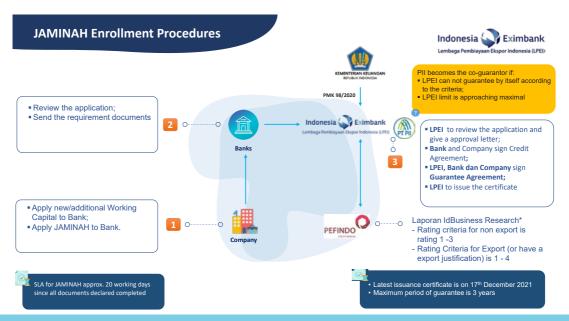
Menurut Dikdik, ruang bagi perusahaan pembiayaan untuk bisa mengakses penjaminan melalui LPEI bisa masuk lewat kategori perusahaan nonekspor. "Kalau perusahaannya ekspor, tidak masalah. Kalau lihat jenis perusahaan pembiayaan, masuknya kategori nonekspor," katanya.

Sampai dengan Juli 2021, penjaminan yang dilakukan oleh LPEI ditargetkan mencapai Rp2,16 triliun. Sejalan dengan adanya perluasan, Dikdik menyatakan peningkatan penjaminan cukup besar dibandingkan dengan 2020.

Dia menuturkan, perusahaan pembiayaan ada yang sedang dalam proses pengajuan penjaminan. "Sekitar Rp600 miliar pipeline dari perusahaan pembiayaan,"jelasnya.

Menurutnya, realisasi penjaminan memang relatif masih kecil. Hal itu tak lepas dari langkah hatihati yang dilakukan oleh perbankan. "Tantangan, risiko dari bank yang lebih hati-hati. Bank juga melakukan review secara konservatif," katanya.

Direktur Utama PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) Yohanes Arts Abimanyu menyatakan dalam menilai profil risiko, ada sejumlah indikator yang dipakai seperti laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, profil perusahaan, informasi kredit, proyeksi bisnis dalam 1 tahun ke depan, dan rencana bisnis perusahaan.



FOKUS

Relasi bisnis perusahaan dengan induk usaha, kata Yohanes juga cukup membantu untuk mengukur profil risiko perusahaan yang hendak mengajukan penjaminan dan diukur risikonya.

Pefindo Biro Kredit, katanya akan mengeluarkan laporan profil risiko entitas secara lengkap; laporan bisnis dan informasi kredit; dan informasi pendukung lainnya. Laporan itu akan dijadikan tolak ukur dalam menentukan kelayakan perusahaan, khususnya dalam mengajukan penjaminan.

PELUANG P2P LENDING

Peluang kerja sama antara perusahaan pembiayaan juga terbuka melalui platform layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech peer-to-peer (P2P) lending.

Chairman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi menuturkan kolaborasi antara perusahaan pembiayaan dan platform P2P lending memberikan keuntungan kepada masing-masing entitas.

Menurut Adrian, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai super lender dengan menentukan kriteria calon penerima pinjaman (borrower) serta menyalurkan pinjaman kepada debitur. Bagi perusahaan P2P lending, pangsa pasarnya akan lebih luas dengan melakukan akuisisi calon peminjam potensial kemudian melakukan penataan proses kredit dan menerima pembayaran pinjaman untuk kemudian diteruskan kepada perusahaan pembiayaan.

Adapun skema kerja sama antara perusahaan pembiayaan dan P2P lending, kata Adrian dapat berupa channeling maupun joint financing. Dalam skema channeling, pembiayaan disalurkan perusahaan pembiayaan melalui P2P lending.

Kemudian, perusahaan P2P *lending* melakukan penilaian kredit dan bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan untuk melakukan pengecekan debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Setelah profil debitur/ peminjam sesuai dengan kriteria, perusahaan P2P lending menyalurkan dana kepada peminjam. Namun, transaksi tersebut tercatat dalam pinjaman perusahaan pembiayaan.

Lalu, peminjam membayar dana yang dipinjam dan biaya bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman. Perusahaan P2P lending memberikan laporan dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai perjanjiannya dengan perusahaan dengan pembiayaan.

untuk joint financing, Adapun Adrian menjelaskan dapat dilakukan ketika nilai pinjaman yang diajukan oleh peminjam terlalu besar untuk dibiayai oleh satu lembaga keuangan.

Pembiayaan bersama adalah antara perusahaan pembiayaan dan fintech P2P lending kepada penerima kredit (end user) melalui instansi dengan porsi risiko yang disepakati antara perusahaan pembiayaan dan P2P lending dengan menggunakan syarat dan ketentuan sesuai bisnis perusahaan pembiayaan.

Adrian menjelaskan pada prinsipnya, industri keuangan P2P lending disiapkan sebagai penghubung utama di ekosistem keuangan. Industri P2P tak bisa berjalan sendiri, karena pada dasarnya memang hanya memiliki model bisnis untuk menyalurkan dana.

Oleh sebab itu, kolaborasi merupakan kunci, di mana industri P2P bisa memberikan keuntungan kepada lembaga jasa keuangan konvensional dari segi penyaluran dana secara digital, lewat perannya sebagai lender institusi atau super lender.

Adrian meyakini berbagai kolaborasi yang berjalan, merupakan salah satu langkah mendorong inisiatif dan inovasi dari platform, yang berupaya untuk terus berperan penting dalam penciptaan solusi bisnis digital terintegrasi.

Berdasarkan data hingga April 2021, bisnis P2P lending tercatat telah berhasil menggandeng 632.404 entitas lender, meningkat pesat ketimbang awal tahun ini yang masih sejumlah 578.907 entitas lender.

Adapun, lender institusi yang menyalurkan kreditnya melalui bantuan industri P2P lending dan memiliki sumbangan outstanding per April 2021, terbesar disumbang oleh entitas badan usaha dalam negeri.

Tepatnya, 206 institusi yang masuk kategori badan hukum lain-lain Rp6,58 triliun. Disusul 98 institusi perbankan lokal terdiri dari 63 bank umum, 1 BPD, dan 34 BPR (Rp2,33 triliun), kemudian 85 institusi IKNB terdiri dari 53 perusahaan pembiayaan, 20 modal ventura, dan 1 perusahaan asuransi (Rp1,33 triliun), serta 25 institusi koperasi (Rp579,01 miliar). (*)





		UJIAN ONLINE	DIKLAT ONLINE	TANGGAL TUTUP PENDAFTARAN
Manajerial		15 SEP 2021	8 - 14 SEP 2021	30 AGT 2021
Direksi & Komisaris	ENG IND	26 AGT 2021 24 SEP 2021	22 - 26 AGT 2021 23 - 24 SEP 2021	16 AGT 2021 14 SEP 2021

Profesi Penagihan oleh Perusahaan Pembiayaan Sejak 2017, perusahaan pembiayaan sudah dapat mendaftarkan sendiri ujian Sertifikasi Profesi Penagihan setiap Senin s/d Sabtu pukul 08.00 - 19.00 (5 sesi pilihan). TANPA LIMIT JUMLAH PESERTA (UNLIMITED)



INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI:

Excel: 0812 1816 0812 info@sppi.co.id

Bisnis Multifinance di Indonesia Prospektif



enetrasi bisnis pembiayaan di Indonesia dinilai masih cukup prospektif. Berbagai skema pengembangan bisnis, baik melalui pola-pola digitalisasi dan kerja sama antarentitas maupun *joint venture*, membuka peningkatan daya saing bisnis pembiayaan. Bagaimana peluang pengembangan layanan oleh perusahaan pembiayaan di Indonesia, berikut kutipan wawancara dengan Ketua Bidang **Hubungan Joint Venture Asosiasi Perusahaan** Pembiayaan Indonesia (APPI) Tetsushi Tanaka yang juga menjabat sebagai Managing **Director PT Oto Multiartha.** Berikut kutipannya:

Selaku ketua yang membidangi hubungan joint venture, bagaimana Anda melihat peluang bisnis multifinance di tengah digitalisasi?

Teknologi digital memberikan peluang yang besar bagi industri pembiayaan untuk dapat mempercepat layanan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan layanan, meningkatkan kualitas pembiayaan, dan secara bersamaan melakukan efisiensi. Implementasi digitalisasi bagi pelaku industri pembiayaan akan menjadi investasi yang mendatangkan keuntungan dan menjaga daya saing di tengah kompetisi global.

Dalam membangun kolaborasi atau menjalin kerja sama (joint venture), biasanya hal apa saja yang perlu dipertimbangkan perusahaan multifinance?

Keselarasan visi dan misi dalam mengembangkan usaha sangat penting dalam membangun kolaborasi atau menjalin kerja sama. Selain itu perusahaan pembiayaan juga memiliki kebutuhan modal dalam mengembangkan usahanya, terutama pada saat ini mayoritas perusahaan pembiayaan berfokus pada pengembangan teknologi informasi dalam menghadapi tantangan pandemi.

PROFIL



Apakah Anda melihat bisnis multifinance di Indonesia prospektif?

Melihat perkembangan tingkat ROA dan ROE industri pembiayaan di Indonesia tampak potensi bisnis yang prospektif untuk jangka panjang. Terlebih lagi saat ini pelaku industri pembiayaan sedang berlomba-lomba menerapkan digitalisasi yang akan meningkatkan kecepatan, jangkauan, kualitas, dan efisiensi. Dengan demikian, saya melihat bahwa bisnis multifinance di Indonesia akan tumbuh dan persaingan menjadi semakin ketat, sehingga penting bagi setiap perusahaan pembiayaan untuk dapat meningkatkan daya saing dan kompetensinya.



Banyak Perusahaan asing yang memiliki minat untuk menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan lokal di Indonesia. Adanya kepastian hukum untuk berbisnis di Indonesia disertai ketentuan administrasi yang jelas dan handal akan memberikan akses yang baik dan adil bagi para investor asing. Saya juga berharap bahwa penerapan Omnibus Law akan berdampak positif dan memudahkan para investor luar negeri untuk berinvestasi di industri multifinance Indonesia.

Sebagai ekspatriat yang memimpin perusahaan di Indonesia, mungkin bisa digambarkan perbedaan bisnis multifinance di Indonesia dan di negara asal Anda (Jepang)?

Pertumbuhan bisnis multifinance tentunya juga didukung oleh permintaan pasar yang besar. Adapun di Jepang, permintaan pasar cukup terbatas karena jumlah populasi masyarakatnya menurun, dimana jumlah kelahiran berkurang dan populasi penduduk yang bertambah usia semakin bertambah.

Sedangkan untuk pasar Indonesia dapat diharapkan tumbuh di masa depan, di mana populasi pertumbuhan masyarakatnya semakin bertambah, dengan demikian skala kebutuhan masa depan tentu akan berbeda, dimana Indonesia akan memimpin dibandingkan Jepang.





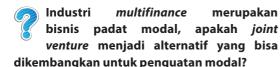
Menurut Anda, peluang kerja sama apa saja yang bisa dikembangkan oleh perusahaan multifinance di Indonesia?

Perusahaan pembiayaan dalam upava melakukan perluasan jangkauan pembiayaannya dapat melakukan kolaborasi dengan Perusahaan fintech, e-commerce, dan toko-toko online yang saat ini tengah berkembang. Untuk meningkatkan kecepatan kualitas pembiayaannya, perusahaan pembiayaan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi terutama yang memiliki pengembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelegence - AI).



Anda membidangi hubungan joint venture di APPI, apakah ada rencana yang ingin dikembangkan?

Pertama-tama, saya ingin mengumpulkan informasi tentang apa saja kebutuhan di industri multifinance, terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini. Selanjutnya, saya ingin berdiskusi dengan masing-masing perusahaan anggota bagaimana cara mengembangkannya dan kemudian beralih ke langkah-langkah pengembangan selanjutnya.



Menurut saya joint venture sangat memungkinkan untuk menjadi alternatif yang dapat dikembangkan untuk penguatan modal industri multifinance. Negara-negara maju seperti Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat memiliki kemauan dan kemampuan untuk berinvestasi yang aman dan berimbal hasil tinggi, seperti di Indonesia. Selain itu, produsen barang konsumsi juga aktif mengembangkan pasar baru yang berarti besarnya permintaan dari masyarakat, adapun pengembangan pasar baru ini juga akan membutuhkan banyak modal terutama pada industri pembiayaan.

Secara umum, Anda melihat minat perusahaan luar negeri untuk menjalin keria sama dengan perusahaan mulitifinance Indonesia di tengah pandemi Covid-19, masih cukup tinggi?



Menurut saya joint venture sangat memungkinkan untuk menjadi alternatif yang dapat dikembangkan untuk penguatan modal industri multifinance.

lya, saya melihat minat perusahaan luar negeri untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan multifinance Indonesia di tengah pandemi Covid-19 masih cukup tinggi. Hal ini juga didukung oleh kesiapan dan ketekunan pemerintah dalam meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Salah satunya dengan menggiatkan kegiatan vaksinasi.

Adapun industri *multifinance* Indonesia masih memiliki segment pasar yang sangat baik dimana masih banyaknya kebutuhan dan permintaan dari masyarakat, sehingga hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan perusahaan luar negeri. Ada kemungkinan industri yang terkait dengan produksi, seperti manufaktur, pertambangan, pertanian, perikanan, dan lainnya juga akan berkembang secara signifikan, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan perusahaan multifinance tersebut.



Negara-negara mana saja yang selama ini memiliki minat menjalin kerja sama dengan multifinance di Indonesia?

Tidak hanya negara-negara maju di Uni Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga beberapa negaranegara maju di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania juga tertarik, salah satunya adalah Jepang.

PROFIL



Bagaimana Anda melihat bisnis multifinance ini, terutama di saat pandemi Covid-19?

Investor asing saat ini masih cenderung menunggu dalam melakukan investasi. Perkembangan proses vaksinasi dan pengendalian penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah terutama pembatasan mobilisasi masyarakat membawa yang dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya yakin Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan yang terarah dan terukur untuk melakukan pengendalian penyebaran Covid-19 yang belakangan ini meningkat sangat tajam.

Berada dalam tekanan pandemi, bisnis multifinance dituntut untuk menjaga likuiditasnya untuk dapat melakukan operasionalnya dengan baik, dengan demikian dukungan dari investor asing masih sangat dibutuhkan.

Peluang-peluang apa saja yang masih bisa digarap?

Masih banyak peluang yang dapat digarap, karena masih cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan, terutama untuk sektor kecil dan menengah. Saya berharap kita dapat menemukan model bisnis yang tidak hanya sekedar memberikan pembiayaan masyarakat Indonesia, namun juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi para pelaku bisnis, dan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bagaimana dengan penetrasi ke wilayahwilayah luar Jawa?

Ada banyak kebutuhan finansial di luar Jawa, seperti pembangunan infrastruktur (salah satunya adalah proses pemindahan ibu kota), sektor perkebunan, pertambangan, perikanan dan lainnya. Adapun segment pasar di wilayah luar Jawa masih sangat besar dan saat ini mayoritas multifinance masih mendominasi pembiayaannya di pulau Jawa. Dengan demikian, perlu dilakukan penetrasi lebih ke wilayah-wilayah diluar pulau Jawa agar dapat meningkatkan pembiayaan



dan perekonomian masyarakat Indonesia secara komprehensif. Dengan perkembangan e-commerce. diharapkan dapat dilakukan penetrasi lebih dalam kepada masyarakat yang tinggal jauh dari kota-kota besar, sehingga mereka juga dapat memiliki lebih banyak kesempatan dapat mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan di daerahnya.

Adanya perkembangan teknologi keuangan, hal yang bisa apa dioptimalkan perusahaan multifinance?

Perkembangan teknologi keuangan terutama dalam masa pandemi ini sangat dibutuhkan untuk dapat memperlancar operasional bisnis perusahaan multifinance. Dari sisi pemberian pembiayaan, teknologi keuangan dapat membantu analisa yang lebih akurat terhadap kemampuan calon pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kualitas aset pembiayaan. Sedangkan dari sisi penagihan, perusahaan multifinance tentunya akan sangat terbantu dengan penggunaan teknologi keuangan, maupun melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech untuk dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas cakupan layanan. (*)

Daya Saing SDM Perlu Disiapkan

JAKARTA Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai salah satu Lembaga pelatihan di industri keuangan menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM sebagai upaya menciptakan ekosistem di industri jasa keuangan yang semakin mapan.

Menurut Direktur LPPI Edy Setiadi, lembaga itu secara aktif turut menggelar pelatihan manajerial bagi pelaku industri jasa keuangan termasuk industri keuangan nonbank (IKNB).

Menurutnya, program itu didisain bagi IKNB level eksekutif setara Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank). Program manajerial LPPI dapat diikuti mulai *level* persiapan Pendidikan *Officer* dan seterusnya manajer/kepala cabang, kepala cabang senior, kepala divisi bahkan sampai level direksi.

"Kami melihat pelatihan untuk manajerial atau leadership, sebenarnya prinsipnya sama bagi seluruh pelaku di industri jasa keuangan. Apalagi untuk industri yang terbilang besar di IKNB seperti perusahaan pembiayaan, juga asuransi dan penjaminan, serta dana pensiun. Karena keterkaitan di antara IKNB, dan antara mereka dengan perbankan juga kuat," katanya.

Sebagai orang yang pernah berkiprah di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edy menuturkan peserta mendapatkan yang sesuai materi dengan kebutuhan industrinya.

"Tentu terutama masuk ke modul yang namanya leadership, yang diceritakan sana termasuk bagaimana menjadi pribadi yang mendobrak atau Kemudian, transformatif. bagaimana mereka menjadi role model," katanya.

Selain itu. ada pula business modul berkaitan environment yang fokus di IKNB. Menurutnya, ada regulasi terkhusus dari regulator dan ada pula yang berkaitan dengan industri

keuangan secara umum, seperti perpajakan dan sebagainya.

"Ini perlu penjelasan dan pemahaman karena kita dalam situasi yang senantiasa berubah, dan bukan hanya economic environment di level lokal, tapi juga *global*. Harapannya, mereka siap untuk bersaing, terutama perkembangan lingkungan bisnis terkini. Contohnya, sekarang ini kan tidak bisa kita bekerja tanpa digitalisasi, dan berbagi pengalaman dalam training tentu akan membantu memperkenalkan banyak perspektif," jelasnya.

Adapun materi lainnya terkait dengan orientasi untuk mengasah para ahli di bidang tertentu. Misalnya, terkait dengan manajerial yang mengarah ke tiga hal yakni menjadi komunikator yang baik, decision making terutama bagaimana melihat business direction dan bagaimana eksekusinya, serta terakhir bagaimana orientasi bisnis ke depan.

> Edy menuturkan bicara SDM tidak bisa lepas dari bagaimana setiap pimpinan dalam mengembangkan bisnis perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dia menuturkan setiap inovasi oleh perusahaan, harus siap luar-dalam dan tetap mampu menjaga koridor kesehatan yang ingin dicapai, seperti tingkat rasio pembiayaan bermasalah (NPF), gearing ratio-nya dipertahankan berapa, ROA, ROE, dan sebagainya.

"Karena, bagaimanapun inovasi produk dan aktivitas usaha ketika didesain di dalam rencana bisnis, harus bisa dijalankan perusahaan untuk mencapai sasaran yang diharapkan dan akan bergantung pilihan aktivitas yang juga berbedabeda. Apakah harus mengubah sistem perusahaan, apakah akan dibuat sebagai produk tradisional atau out of the box atau hasil kolaborasi, atau membutuhkan investasi di bidang tertentu," katanya. (*)

Pemerintah Rilis Regulasi Anyar PPnBM Mobil Listrik

JAKARTA — Pemerintah resmi merevisi aturan pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berlaku untuk mobil listrik. Beleid baru ini membuat mobil plug-in hybrid vehicle (PHEV) dan full hybrid mengalami kenaikan tarif.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2021 tentang Perubahan Atas PP 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

"Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PPnBM untuk kendaraan plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle dalam PP 73/2019," bunyi penggalan salah satu bagian pertimbangan dalam PP 74/2021.

Melalui PP 74/2021, pemerintah merevisi pasal 36 PP 73/2019 yang mengatur tarif PPnBM atas kendaraan bermotor berteknologi PHEV, battery electric vehicle (BEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

Dalam revisinya, hanya kendaraan bermotor dengan teknologi BEV dan FCEV yang dikenai PPnBM 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 0% dari harga jual. Dalam ketentuan sebelumnya ada kendaraan bermotor berteknologi PHEV.

Dalam aturan baru itu, PHEV dikenakan tarif PPnBM sebesar 15% dengan DPP sebesar 33,33%. Ketentuan khusus terhadap PHEV tertuang dalam Pasal 36A. Selain itu, pemerintah turut merevisi Pasal 26 dan Pasal 27 PP 73/2019 yang keduanya mengatur tarif PPnBM atas kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid. Pada Pasal 26, pemerintah memutuskan untuk menaikkan DPP PPnBM kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi full hybrid dari 13,33% menjadi 40% dari harga jual.

Tarif PPnBM sebesar 15% atas DPP PPnBM sebesar 40% dikenakan atas kendaraan full hybrid dengan kapasitas hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per kilometer. Pada Pasal 27, pemerintah menaikkan DPP PPnBM kendaraan bermotor full hybrid dari yang awalnya sebesar 33,33% dari harga jual menjadi 46,66% dari harga jual.

Adapun, tarif PPnBM yang dikenakan masih tetap, yakni sebesar 15%. Tarif dan DPP PPnBM pada Pasal 27 ini berlaku atas kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 kilometer per liter hingga 23 kilometer per liter, atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per kilometer hingga 125 gram per kilometer. Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Aturan ini akan berlaku pada 16 Oktober 2021. (*)





Eksekusi Barang Jaminan Tak Bisa Sembarangan

JAKARTA — Eksekusi penarikan barang jaminan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan karena adanya kredit yang bermasalah tidak bisa dilakukan sembarangan. Konsumen maupun perusahaan pembiayaan sudah dilindungi lewat aturan Undangundang No. 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus pernah menyatakan bahwa dalam proses penarikan kendaraan, pihak pembiayaan harus memberikan surat peringatan kepada konsumen terlebih dahulu.

"Bahwa ada empat aturan debt collector, finance ini apabila ada tunggakan debitur," ujar Yusri.

Pertama, perusahaan pembiayaan harus mengeluarkan surat kuasa kepada debt collector yang ditunjuk. Kedua, perusahaan pembiayaan harus memiliki jaminan fidusia. Ketiga, ada surat peringatan baik surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan keempat adalah tanda pengenal debt collector, dan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI).

Dalam proses penarikan barang jaminan, pihak perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (debt collector atau tenaga jasa penagihan) yang sudah memiliki sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (LSPPI).

Sementra itu, debt collector yang menarik kendaraan secara paksa dari pemilik yang sah adalah perbuatan pidana. Penagih utang itu dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 335 ayat 1 dengan pasal berlapis Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 jo Pasal 53 KUHP).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia ini sebenarnya memperjelas pasal 15 Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cidera Janji antara Debitur dan Kreditur.

"Jadi, perusahaan pembiayaan masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur macet yang sebelumnya telah diperingatkan. Dengan catatan, prosedur sudah dijalankan," kata Suwandi beberapa waktu yang lalu saat acara InfobankTalkNews 'Pasca Putusan MK Tentang Fidusia: Leasing Masih Bisa Tarik Kendaraan Debitur Macet.

Dalam putusan MK disebutkan, eksekusi tanpa pengadilan dibolehkan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanprestasi.

Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate execute).

"Apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi putusan MK. (*)

Perusahaan Pembiayaan **Tidak Merampas Kendaraan**

BENGKULU Aparat kepolisian dan Kejaksaan di Bengkulu tidak bisa memproses sejumlah dugaan laporan penarikan kendaraan secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap debiturnya.

Menurut Kepala **Bidang** Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Sudarno, pihaknya sudah membawa laporan dugaan perampasan kendaraan pihak perusahaan pembiayaan ke pihak Kejaksaan setempat.

Hanya saja, laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana.

"Mengapa tidak bisa dilanjutkan ke proses pengadilan, karena tidak memenuhi unsur pidana. Setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan, peristiwa itu bukan perkara pidana perampasan," katanya.

Menurutnya, proses penarikan barang jaminan oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan, telah diatur dalam satu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama.

Menurutnya, perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga kepada debitur yang menunggak cicilannya minimal hingga 3 bulan. Selain itu, proses komunikasi dan pendekatan persuasif sudah dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada debitur.



Dia menuturkan. setelah diteliti oleh pihak Kejaksaan, sejumlah perkara di Bengkulu tidak bisa dilanjutkan prosesnya, karena prosedur yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sudah benar dan tidak ada unsur perampasan.

Selain itu, pihak yang diminta melakukan penarikan juga telah mengantongi surat yang resmi untuk melakukan penarikan.

perusahaan "Pihak pembiayaan sudah memberi

surat peringatan. Yang melakukan penarikan juga jelas," katanya.

Pihak yang melakukan penarikan, kata Sudarno melakukan upaya persuasif yang pada intinya mengajak pihak debitur untuk ke kantor perusahaan pembiayaan dan kendaraan yang dimiliki dibawa ke kantor.

"Jadi itu bukan perampasan. Penarik meminta debitur membawa kendaraannya ke kantor. Kalau laporannya debitur perampasan, setelah dilakukan penyidikan, bukan perampasan," jelasnya.

Dengan demikian, laporan-laporan itu tidak dapat diproses lebih lanjut. Dia juga meminta masyarakat memahami tata cara dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit agar laporan dugaan perampasan, dapat dihindari.

Dia menegaskan, kewajiban pihak penyalur kredit dan debitur sudah diatur melalui surat perjanjian dan hal itu harus saling dihormati. (*)



Bunga Kredit Turun Tak Dorong Permintaan di Masa Pandemi

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penurunan suku bunga kredit bukan satu-satunya komponen yang bisa mendorong permintaan kredit oleh masyarakat dan dunia usaha.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa pada kondisi normal sebelum pandemi, tingkat suku bunga kredit memang berpengaruh cukup signifikan mendorong permintaan kredit.

"Namun pada kondisi pandemi permintaan kredit menjadi inelastis dan perubahan tingkat suku bunga kredit tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan kredit," katanya.

Wimboh menyatakan adanya masalah struktural di dalam pasar, di mana sektor-sektor yang berdampak langsung belum membutuhkan kredit, modal kerja terlebih investasi sebagaimana sebelum adanya Covid 19.

"Manufaktur saat ini masih belum full capacity operasinya seperti sebelum Covid-19, pariwisata turis global masih belum bisa masuk ini luar biasa dampaknya, hotel pun okupansi rendah, airline passenger juga belum banyak, rental mobil juga yang membutuhkan biasanya turis mancanegara dan restoran juga belum banyak pengunjung dan itu semua berdampak besar terhadap penciptaan tenaga kerja dan permintaan kredit," katanya.

Wimboh menambahkan saat ini pertumbuhan kredit sangat bergantung pada confident masyarakat dan keyakinan dunia usaha.

"Bagaimana aktivitas ekonomi ini bisa berlangsung kembali dan kembali pulih semua bergantung pada mobilitas. Kami yakin percepatan vaksinasi, kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan merupakan kunci pemulihan ekonomi." (*)



COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE PERSON

Minimizer Berger Berger

minimum that the property of t

THE PERSON NAMED IN THE PE

PROSPEK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Fokus Jaga Collection dan Arus Kas



JAKARTA — Perusahaan pembiayaan fokus menjaga collection dan arus kas serta membayar kewajiban kepada perbankan selama 2020—2021 atau di masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi bisnis, terlebih situasi tengah dihadapkan masa pembatasan aktivitas sosial masyarakat yang berpotensi menaikkan permintaan restrukturisasi kredit oleh debitur.

Berdasarkan data hingga 28 Juni 2021, permohonan restrukturisasi yang diterima 167 perusahaan pembiayaan mencapai 5,75 juta kontrak pembiayaan, dengan nilai outstanding pokok Rp180,92 triliun dan bunga Rp48,87 triliun.

Permohonan yang disetujui mencapai 5,13 juta kontrak dengan nilai pokok Rp164,42 triliun dan bunga Rp44,76 triliun.

Adapun, yang ditolak sebanyak 352.897 kontrak dengan nilai pokok Rp8,91 triliun dan bunga Rp2,28 triliun. Sisanya, atau sebanyak 261.185 kontrak masih dalam proses.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI Suwandi Wiratno mengatakan bahwa industri pembiayaan memang menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti terbatasnya mobilitas karyawan khususnya dalam aktivitas penagihan.

Tantangan lainnya, pertumbuhan piutang pembiayaan diperkirakan masih akan terkontraksi, disertai biaya-biaya beban yang meningkat dan terbatasnya sumber pendanaan.

Dia berharap adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat tidak berdampak terhadap melonjaknya rasio pembiayaan

bermasalah atau non-performing financing (NPF).

Menurutnya, fenomena restrukturisasi dan lonjakan NPF memang menjadi sejumlah tantangan besar para pemain industri pembiayaan jelang semester II/2021, di samping terbatasnya mobilitas dalam hal penagihan, kontraksi pertumbuhan piutang, biaya-biaya beban yang meningkat, serta terbatasnya sumber pendanaan.

"Tapi kami yakin tidak sama seperti 2020, melihat kondisi beberapa hari ini, dan saya tanya di anggota kami pun average debitur yang sebelumnya mendapatkan restrukturisasi, sudah 60 sampai 70 persen yang membayar cicilan lagi," katanya.

Suwandi menjelaskan bahwa realisasi program restrukturisasi terbilang sukses untuk ikut menjaga kualitas piutang dari perusahaan pembiayaan, ditopang komunikasi dan penjelasan yang baik terhadap para debitur.

Restrukturisasi biasanya direkomendasikan kepada debitur yang masa cicilannya sudah lama, sementara debitur yang baru mulai tapi terdampak dan tidak kuat membayar cicilan, diarahkan untuk pengembalian unit secara baikbaik disertai kompensasi. Adapun, debitur yang ditolak, merupakan mereka yang tidak sesuai kriteria terdampak pandemi.

"Salah satu kasus sebagai contoh, ada debitur ASN [aparatur sipil negara] yang masih dapat gaji, kemudian daripada kendaraannya nganggur, dipakai oleh suaminya sebagai driver online, dan kemudian minta restrukturisasi, tapi tentu tidak masuk kriteria terdampak pandemi. Terpenting, setiap orang kita jelaskan dengan baik. Tapi selain itu, ada juga debitur yang hanya coba-coba," katanya.

Selain berkaitan restrukturisasi, Suwandi juga mengingatkan potensi perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan kredit macet, akibat terpengaruh kondisi debitur perusahaan pembiayaan yang usahanya atau pekerjaannya terdampak PPKM.

Apalagi, di era *new normal* ini banyak debitur yang 'diam-diam saja' dan tidak mau berkomunikasi, tapi tiba-tiba hilang dan tak membayarkan cicilannya, bahkan sampai 'nakal' dan nekat melanggar perjanjian fidusia dengan menjual objek pembiayaan akibat terhimpit kondisi ekonomi.

Adapun berdasarkan data hingga akhir kuartal I/2021, Suwandi menjelaskan kondisi NPF



industri masih meningkat, namun sudah mulai pulih ketimbang periode Juli-Agustus 2020 di mana kredit bermasalah mencapai rekor hingga di atas 5%.

Secara terperinci, NPF gross pada April 2020 dan April 2021 masing-masing mencapai 3,30% dan 3,88%, sementara NPF netto naik dari 0,65% pada April 2020 ke 1,35% pada April 2021.

Untuk kolektibilitas kurang lancar menurun dari 0,94% pada April 2020 menjadi 0,73% pada April 2021. Kolektibilitas diragukan juga mengalami penurunan yang pada April 2020 sebesar 0,85% menjadi 0,83% pada April 2021. Sedangkan untuk kolektibilitas macet mengalami kenaikan dari 1,51% pada April 2020 ke 2,33% pada April 2021.

Adapun untuk kolektibilitas lancar tercatat naik dari 80,41% pada April 2020 ke 87,67% pada April 2021, sementara kategori kolektibilitas dalam perhatian khusus turun dari 16,29% di April 2020 menjadi 8,45% di April 2021.

Sementara itu, perpanjangan pemberlakuan subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 100% untuk mobil baru hingga Agustus 2021 membuat industri pembiayaan cukup percaya diri untuk mencatat kinerja positif.

Sebelumnya pemerintah mematok periode diskon PPnBM penuh hanya terselenggara pada periode Maret—Mei, sementara periode Juni— Agustus hanya 50%.

Adanya kebijakan relaksasi PPnBM itu, kata Suwandi penting bagi perusahaan pembiayaan mempertahankan momentum perbaikan aset finansial miliknya.

Beberapa tantangan masih mengganjal kemampuan perusahaan pembiayaan dalam ikut mendukung kinerja penjualan industri otomotif pada era new normal ini.

Antara lain, terkait supply yang terbatas akibat pembatasan kegiatan produksi di pabrik perakitan kendaraan, serta dampak krisis ketersediaan semikonduktor (microchip) selaku bahan baku 'fitur pintar' untuk mobil-mobil anyar.

Direktur Utama PT BCA Finance Roni Haslim berharap besar periode perpanjangan diskon PPnBM ini membuka peluang perbaikan pembiayaan baru secara bulanan setidaknya menyentuh kinerja sebelum Covid-19.

Salah satu kasus sebagai contoh, ada debitur ASN [aparatur sipil negara] yang masih dapat gaji, kemudian daripada kendaraannya nganggur, dipakai oleh suaminya sebagai driver online, dan kemudian minta restrukturisasi, tapi tentu tidak masuk kriteria terdampak pandemi. Terpenting, setiap orang kita jelaskan dengan baik.

> —Suwandi Wiratno. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

"Ini bagus karena kondisi pasar mobil setelah lebaran itu biasanya akan turun. Tapi kendala utama memang stok mobil banyak yang masih belum ada karena kendala supply dari pabrik. Jadi harapannya di periode ini kalau penyaluran belum bisa pulih 100% pun, bisa 75% dari kondisi sebelum pandemi saja sudah sangat bagus," ujar Roni. (*)

PENERBITAN OBLIGASI

Perusahaan Pembiayaan **Masih Dominan**

JAKARTA — Penerbitan obligasi oleh industri jasa keuangan cukup semarak sepanjang semester pertama tahun ini. Kendati trennya akan menyusut memasuki semester II/2021, dominasi oleh perusahaan keuangan khususnya perusahaan pembiayaan cukup kuat.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat telah menerima mandat senilai Rp75,58 triliun untuk pemeringkatan terkait dengan rencana penerbitan obligasi. Dari nilai tersebut, mandat dari sektor jasa keuangan mencapai Rp20,05 triliun atau 26,53% dari rencana obligasi yang bakal diterbitkan.

Perusahaan pembiayaan masih cukup aktif menggalang dana lewat penerbitan obligasi dari kelompok industri keuangan ini. Setidaknya ada tiga perusahaan yang antre merilis surat utang korporasi dengan nilai Rp9,3 triliun.

Kendati bank dan perusahaan pembiayaan cukup dominan dalam daftar penerbit obligasi, Utama Pefindo Salvadi Saputra mengatakan bahwa dua industri itu tidak akan melakukan banyak emisi pada sisa tahun ini.

Menurutnya, kebanyakan perusahaan yang merencanakan emisi surat utang pada semester kedua tahun ini bertujuan melakukan refinancing utang obligasi yang sudah ada.

Dia menuturkan prospek emisi obligasi korporasi pada semester II/2021 dibayangi oleh sentimen melonjaknya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Hal itu berpotensi menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia.

Selain itu, adanya pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021 bisa memperlambat upaya pemulihan ekonomi dan menaikkan persepsi risiko investasi di Indonesia yang berdampak pada turunnya serapan surat utang korporasi oleh investor.

Sentimen lain yang akan mempengaruhi outlook obligasi korporasi Indonesia adalah langkah tapering The Fed yang hingga kini belum jelas.

Salyadi menjelaskan, meskipun kebijakan tapering belum akan dilakukan pada tahun ini, risiko pada pasar obligasi korporasi akan tetap terlihat. Investor telah memasang sikap waspada terhadap Indonesia menyusul lonjakan kasus positif virus Covid-19 beberapa waktu belakangan.

Kenaikan risiko pasar tersebut memicu terjadinya outflow dari pasar surat berharga negara yang akan turut berimbas pada kenaikan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN).

"Akibatnya, yield dan kupon obligasi korporasi juga akan semakin tinggi," jelasnya.

Dia menuturkan kenaikan risiko tersebut akan membuat emiten cenderung lebih selektif dan waspada sebelum melakukan emisi obligasi pada semester II/2021.

Pada awal tahun ini, Pefindo memproyeksi penerbitan surat utang korporasi 2021 akan berada di kisaran Rp122 triliun hingga Rp159 triliun. Meski demikian, melihat kondisi pasar dan sentimen yang ada, Salyadi mengatakan Pefindo akan merevisi outlook ini dalam waktu dekat.





Sumber: Pefindo: diolah

Hingga semester I/2021, total penerbitan surat utang korporasi di Tanah Air sebesar Rp43,37 triliun. Jumlah itu naik dibandingkan dengan emisi sepanjang semester I/2020 lalu sebanyak Rp30,03 triliun.

Penerbitan obligasi korporasi pada semester I/2021 menunjukkan puncaknya pada periode Maret - April lalu. Hal tersebut terjadi seiring dengan optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) tengah merencanakan penawaran Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi Rp1,3 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah Rp200 miliar.

Direktur Keuangan Adira Finance I Dewa Made Susila menjelaskan pada semester II/2021, strategi diversifikasi pendanaan merupakan keniscayaan bagi perusahaan pembiayaan.

berkode ADMF Emiten ini setidaknya membutuhkan penggalangan dana dengan diversifikasi dari pasar modal paling sedikit senilai Rp9,3 triliun, lantaran tahun ini memiliki surat utang yang jatuh tempo di kisaran tersebut.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOMF) Zacharia Susantadiredja menyatakan perseroan bakal menerbitkan surat utang baru melalui Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1/2021 senilai Rp500 miliar.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan, sejauh ini minat pasar terhadap obligasi korporasi di Indonesia masih cukup baik. Hal tersebut didukung oleh pergerakan imbal hasil (yield) SUN Indonesia yang mulai melandai.

"Yield SUN kita juga bergerak turun beberapa waktu lalu, sehingga investor pasti akan mencari obligasi korporasi karena kuponnya yang cukup tinggi," jelasnya.

Sepanjang semester I/2021, tingkat likuiditas pasar obligasi saat ini juga masih cukup besar. Hal ini akan memicu investor mencari aset-aset menarik untuk menaruh dananya.

Di sisi lain, perusahaan juga mulai gencar melakukan penerbitan surat utang. Halini dilakukan guna mengeksekusi rencana ekspansi yang tidak terjadi pada tahun lalu. Namun, prospek pasar surat utang korporasi Indonesia ke depannya dibayangi kembali melonjaknya angka kasus positif.

Ramdhan mengatakan, hal tersebut akan berimbas pada keyakinan emiten untuk menerbitkan obligasi. Dengan kondisi pasar yang kurang kondusif, perusahaan akan mengkhawatirkan tingginya biaya penerbitan (cost of fund) dan kupon yang melonjak.

"Kesiapan perusahaan dalam menerbitkan obligasi pasti akan terganggu. Dengan adanya PPKM Darurat, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan optimal sehingga berimbas pada kinerjanya," jelas Ramdhan.

Sentimen lain yang akan mempengaruhi penerbitan obligasi korporasi adalah track record dan rating utang perusahaan tersebut. Umumnya, minat investor terhadap obligasi perusahaan dengan rating yang biasa saja atau track record yang kurang baik akan rendah.

Sebaliknya, rekam jejak yang baik dan peringkat utang yang stabil akan meningkatkan selera investor dan penyerapan surat utang tersebut. Selain itu, cost of fund yang dikeluarkan perusahaan juga dapat ditekan. (*)

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara

Pertumbuhan Ekonomi Bertumpu di Pengendalian Covid-19

JAKARTA — Prospek ekonomi Indonesia ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menekan penyebaran virus Corona dan determinasi percepatan program vaksinasi.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air pada Maret 2020, langkah pemerintah harus melakukan meningkatkan pengeluaran, meningkatkan defisit anggaran dan melakukan realokasi belanja negara untuk membantu masyarakat dan dunia usaha. Perlahan-lahan pertumbuhan ekonomi membaik. Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2020 sempat menyentuh -3,2%, lalu pada kuartal IV/2020 membaik kendati masih -2%. Memasuki kuartal I/2021, ekonomi Indonesia menyentuh -0,7% dan pada kuartal II/2021 diperkirakan bisa positif 7%.

Ekonom sekaligus Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara mengatakan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi menunjukan satu lonjakan yang cukup luar biasa.

"Itu suatu lonjakan luar biasa. Tapi harus dipahami pertumbuhan 7% di kuartal II/2021 itu karena tahun lalunya di kuartal II/2020 adalah -5%. Masyarakat harus melakukan pembatasan pergerakan, melakukan protokol kesehatan, dan vaksinasi harus dipercepat. Itu kunci jika mau punya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini," ujarnya.

menuturkan Dia pemulihan ekonomi kondisinya bergantung kepada dunia usaha apakah bisa melakukan aktivitas ekonomi. Apabila penularan Covid-19 masih seperti sekarang, aktivitas ekonomi harus diperlambat salah satunya melalui pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurutnya, sebelum ada Covid varian Delta, ekonomi Indonesia sudah mulai ada recovery. "Kalau kita lihat tabel pertumbuhan ekonomi, paling terpuruk itu kuartal II/2020, pada saat itu kita harus melakukan PSBB [pembatasan sosial berskala besar]. Hampir semua kegiatan ekonomi berhenti. Saat itu pertumbuhan ekonomi turun drastis -5%," katanya.

Setelah aktivitas masyarakat diperlonggar dan ekonomi mulai berjalan di semester I/2021, tapi kemudian muncul varian delta yang memaksa harus diberlakukan lagi pembatasan pergerakan masyarakat di pulau Jawa & Bali. Pertumbuhan ekonomi ke depan akan sangat bergantung berapa lama melakukan pembatasan, dan berapa lama kita bisa menurunkan kurva penularan Covid ini.

"Tadinya kita optimistis di kuartal III/2021 bisa tumbuh 5% atau lebih, tapi ternyata ada varian delta, sehingga pertumbuhan mungkin hanya sekitar 4%. Bisa saja bahkan di bawah 3%, atau bahkan kalau makin lama melakukan pembatasan, bisa jadi pertumbuhan minus. Baru kali inilah

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh masalah kesehatan," ujar mantan Deputi Senior Bank Indonesia itu.

Mirza menuturkan indikator pertumbuhan ekonomi itu tercermin di perbankan maupun di industri keuangan lain seperti perusahaan pembiayaan yang merupakan cerminan kinerja sektor riil.

Permintaan kredit perbankan dan industri pembiayaan akan tumbuh apabila ada aktivitas ekonomi, misalnya aktivitas jual beli yang berdampak pada masuknya pendapatan, jual beli kendaraan bermotor, jual beli atau sewa alat berat dan lain sebagainya.

Saat ini, katanya bank kebanjiran likuiditas. "Tapi di sisi lain bank punya portofolio kredit bermasalah seperti kredit sepeda motor, mobil, alat berat. Kalau aktivitas ekonominya melambat kembali, maka portofolio kredit walaupun sudah direstrukturisasi bisa kembali tidak lancar," jelasnya.

Memperhatikan situasi itu, perbankan perlu memperkuat pencadangan kredit/pembiayaan bermasalah. Meski ada relaksasi aturan dari otoritas bahwa bank boleh tidak melakukan pencadangan di masa pandemi, tapi beberapa bank memilih melakukan langkah pencadangan untuk mitigasi risiko.

"Karena mungkin bank khawatir dari kredit konsumsi yang direstrukturisasi tidak bisa bayar karena tergantung orang itu punya income atau enggak. Misalnya bank memberikan kredit kepada hotel, kalau tidak ada orang yang berwisata, tetap saja hotel tersebut tidak bisa bayar kredit. Restrukturisasi berhasil kalau bisa bayar, kalau tidak bisa ya susah," katanya.

Dalam situasi yang seperti saat ini, kata Mirza, mengharapkan perbankan dan perusahaan pembiayaan lebih agresif dalam penyaluran kredit akan terasa berat. "Portofolio yang tadinya tidak perlu direstrukturisasi jadi perlu direstrukturisasi. Penting sekali kita harus mengalahkan Covid ini," ujarnya.

Dia berharap adanya PPKM mampu menekan penyebaran Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepercayaan diri dunia usaha, khususnya bank dan perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan kredit.

Dalam situasi seperti ini lembaga pembiayaan

perlu menjaga hubungan dengan perbankan. Hal ini dikarenakan, tidak sedikit debitur perusahaan pembiayaan yang meminta restrukturisasi. Kondisi itu berimbas pula perusahaan pembiayaan yang meminta restrukturisasi ke bank.

"Jaga kepercayaan bank, sehingga saat nanti Covid sudah dikalahkan, jika perlu pembiayaan baru tidak akan sulit. Memang ekosistemnya seperti itu. Memang situasi sekarang tidak mudah, pada saat memang harus rem, ya harus direm. Karena kalau situasi sedang jelek, orang tidak punya uang untuk barang, misalnya beli mobil, beli sepeda motor," katanya.

Terkait dengan prospek pendanaan oleh perusahaan pembiayaan, Mirza menyatakan selama ini perusahaan pembiayaan mendapatkan dukungan dari bank dan penerbitan obligasi. Meski banyak yang menerbitkan obligasi, perusahaan pembiayaan selama ini sebagian besar berasal dari kredit bank.

Menurutnya, bank akan memberikan kredit baru kalau situasi ekonomi terlihat baik dan daya beli masyarakat tumbuh.

"Lihat ada orang-orang yang mau beli sepeda motor atau mobil. Orang mau beli itu kalau punya pendapatan. Jadi kembali, muter-muter di [isu] Covid lagi," katanya.

Pemerintah mengupayakan sekuat tenaga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) membangkitkan ekonomi. Walaupun pendapatan pajak turun, harus tetap ada upaya anggaran untuk memulihkan ekonomi dan menyehatkan masyarakat.

Adanya insentif PPnBM kendaraan bermotor berpotensi menghidupkan kembali aktivitas perusahaan pembiayaan. Insentif pajak kendaraan motor dan insentif pajak pembelian rumah yang diperpanjang berpotensi meningkatkan permintaan.

"Suku bunga sedang rendah, kalau dalam kondisi normal pasti banyak yang mau beli mobil. Tapi karena ada Covid, pendapatan masyarakat terganggu, sehingga daya beli pun lemah." Harapan kita adalah segera setelah kita berhasil menurunkan penularan Covid maka aktivitas ekonomi dapat pulih dan permintaan kredit pembiayaan meningkat kembali. (*)

LENSA





Vaksinasi Dosis Ke-2 Covid-19 **Bersama Asosiasi** Perusahaan **Pembiayaan Indonesia (APPI)**

sosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) melakukan vaksinasi dosis kedua Covid 19 pada tanggal 21 Juli hingga 28 Juli 2021 yang sebelumnya pemberian vaksinasi dosis pertama sudah dilakukan pada tanggal 22 Juni hingga 30 Juni 2021 . Layanan vaksinasi dosis ke-2 ini diberikan kepada sekitar 5.100 peserta yang terdiri dari karyawan perusahaan pembiayaan anggota APPI, keluarga karyawan perusahaan pembiayaan dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga sentra vaksin yakni RS. Jakarta, RS. PGI Cikini, dan RS. Mitra Keluarga Kalideres. Vaksin yang digelar APPI merupakan bagian dalam upaya percepatan vaksinasi di Indonesia. (*)



FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)

Vaksinasi

Anggota FKD di Berbagai Daerah

Vaksinasi ini merupakan kerjasama antara OJK Daerah, FKIJK, dan Forum Komunikasi Daerah APPI di beberapa daerah.







FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)











FORUM KOMUNIKASI DAERAH (FKD)







AB SINAR MAS MULTIFINANCE Sinar Mas Land Plaza Tower 1 It 9, JI. MH Thamin Kav. 22751, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350 Tip: 392 5660 Fax 392 5788

ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Millennium Centennial Center It 56 Jl. Jend. Sudirman No.Kav 25, RT.4/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 Tip. 39733232, 39733322 Fax: 39734949



ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI Graha Adicipta Jl. Kebon Jeruk Raya No. 80 Jakarta Barat 11530 Tlp: 53673030

ADITAMA FINANCE Plaza Bank Index, 8º Floor JI. M. H. Thamrin Kav. 57, Jakarta Pusat Tip: 31931006 Fax: 31931016



ÆON CREDIT SERVICE

AEON CREDIT SERVICE INDONESIA 3A Plaza Kuningan South Tower, JI. HR Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta 12940 Tlp: 252 3331 Fax: 5288 0232 / 0231

AKULAKU FINANCE INDONESIA Gedung Sahidi Sudirman Center Lt.18 Unit H JI. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat 10220 Tip: 50818930 AL JARAH INDONESIA FINANCE

AL JJARAH INDONESIA FINANCE Menara Palma It. 25 JI. HR Rasuna Said Blok X2 kav 6 Kuningan Jakarta 12950 Telp 021-57957552 / 7553 Fax 021-57957507

AMANAH FINANCE Wisma Kalla Building Lt.3 Jl. Dr. Sam Ratulangi No.8 Makassar 90132 Telp: 0411 – 853210

ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE Gading River View Blok H 56 B, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tip: 45869941 ANDALAN FINANCE INDONESIA

ANDALAN FINANCE INDONESIA JI. Sunburst CBD Lot II No. 3 BSD City, Serpong, Tangerang Selatan 15321 TIp: 021-22356888 Fax: 021-22356899

ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE Plaza ABDA Lt.6 Jl. Jend Sudirman Kav 59 Jakarta 12190 Tip:514 02228 Fax: 514 02224

ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE JI. Raden Tumenggung Suryo No. 28 Malang, Jawa Timur 65123 TIp: 0341-491222 Fax: 0341-470079

ARMADA FINANCE Jl. Jend. Sudirman No. 165, Magelang 56125 Tlp: (0293) 313777 Fax: (0293) 313888 Website: www.armada-finance.co.id

ARTHA PRIMA FINANCE Grand Slipi Tower Lantai 32, Jl. S. Parman Kav. 22-24 Slipi Jakarta Barat 11480, Tlp: 2902 2071/72 Fax: 2902 2085, Website: www.arthaprima.co.id

ARTHAASIA FINANCE
Gedung Kencana Tower Lantai 5-6
Business Park Kebon Jeruk
JI. Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620,
Telp. 021. 58908189 atau 021. 58908190
Fax. 021. 58908146

ASIA MULTIDANA Jl. Pluit Indah Raya No. 31 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Tlp:22673031 / 22673038

ASIATIC SEJAHTERA FINANCE Ruko Karawaci Office Park Excelis 51, Lippo Karawaci, Tangerang 15810 Tlp: 5510200 Fax: 5510898



ASLI RANCANGAN INDONESIA Senayan Business Center Jl. Senayan No.39 Rawa Barat, Jakarta 12180 Tlp:22775752 / 22775752

ASTRA AUTO FINANCE
JI. TB Simatupang No. 90, Tanjung Barat,
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530
Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRA MULTI FINANCE Menara FIF, Lt.7 JJ. 1B. Simatupang Kav.15 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12440 Tip: 769 8899 Fax: 769 8811 www.fifgroup.co.id

.....



ASTRA SEDAYA FINANCE
JI. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12530
TIp: 788 59000 Fax: 788 51220, 788 51198
Website: www.autocybercenter.com

ASTRIDO PACIFIC FINANCE Toyota Building 3rd Floor, Jl. Balikpapan Raya No. 7, Jakarta 10160, Tlp: 231 2220, 231 2221 Fax: 231 0053/345 1334 Website: www.astrido-finance.co.id

ATOME FINANCE INDONESIA
District 8 Treasury Tower Lantai 53 Unit C Sudirman
Central Business District Lot 28
JI. Jenderal Sudirman Kav. 52 — 54
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tip: Fax:

BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO Komp. Ruko Wolter Monginsidi JI. Wolter Monginsidi No. 88 N Jakarta Selatan Tip: 719 6488 Fax: 719 6489

BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Gedung Chase Plaza Lt. 12, JI. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Tlp: 520 0434 Fax: 520 9160



BCA FINANCE Wisma BCA Pondok Indah Lt.8, Jl. Metro Pondok Indah Sektor I-S Kav. No. 10, Jakarta Selatan 12310 Tip: 299 73100 Fax: 29973232/33

BCAmultifinance

BCA MULTI FINANCE Gedung WTC Mangga DUa Lantai 6 Blok CL 001 Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Jakarta Utara 14430 Tip: 29648200 BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE Hermina Tower Kav Blok B/10, Lantai 15, Jalan HBR Motik No. 4, RW 10, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta 10720 TTp: 39700400

BETA INTI MULTIFINANCE Ruko The Greencourt Blok D08 JI. Boulevard Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat Tlp: 5309331 Fax: 5363549



BFI FINANCE INDONESIA BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2, JI. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang Tlp: 296 50300 Fax: 296 60757 www.bfi.co.id

BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE JI. Balikpapan Raya No. 24 Lt. Dasar, Jakarta Pusat 10130 Tlp: 632 1111 Fax: 631 8555

BIMA MULTI FINANCE JI. Cideng Barat No. 47i, Jakarta Pusat Tip: 638 58555 Fax: 638 58001

BINTANG MANDIRI FINANCE Graha Bintang Cikini, Jl. Cikini Raya No 55, Menteng. Jakarta Pusat Tlp: 3983 0391 Fax: 3192 4731/32



BNI MULTIFINANCE Gedung BNI Life Insurance Lt. 5 Jl. Aipda KS Tubun No. 67 Jakarta Pusat 10260 Tlp: 290 22555 Fax: 290 22146

BOSOWA MULTI FINANCE Menara Global Lt. 21 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12950 Telp: (021) 5275230

.....



BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE) Lippo Kuningan Lantai 11 dan GF Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12920 Tip: 5745333 Fax: 5745444



BUANA FINANCE Tokopedia Tower Ciputra World 2 Lt 38, Unit A - F JI. Prof. Dr. Satrio Kav.11 Jakarta 12950 Tlp: 50806969 Fax: 50806996

BUANA SEJAHTERA MULTIDANA Belleza Office Tower Lt. 12 Jl. Letjend Soepeno No 34 Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210 Tip: 29022050-60 Fax: 29022070

BUKOPIN FINANCE Gd. Bank Bukopin Lt. 3 Jl. Melawai Raya No. 66, Jakarta Selatan 12160, Tlp: 726 0756, 724 5014 Fax: 726 0865

••••• BUMIPUTERA - BOT FINANCE Wisma Bumiputera, 11th & 12th Floors, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 Tlp: 570 6762, 522 4522 Fax: 525 561



BUSSAN AUTO FINANCE

BAF Plaza, Jl. Raya Tanjung Barat No.121, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Tlp: 29396000 Fax: 29396100

CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE Jl. Rava Kelana Dua Ruko Blitz 2 Blok C No.17-19. Paramount Serpong, Kel. Kelapa Dua, Tangerang 15810 Tlp: 22229200, 22229449

CAPELLA MULTIDANA Jl. Sunter Paradise Timur Raya Blok G2 No. 4-5 Jakarta Utara Tlp: 640 1001 Fax: 640 1003 ••••••

CATERPILLAR FINANCE INDONESIA Beltway Office Park Tower C Level 3 unit #301-303. Jl. TB Simatupang No. 41 Jakarta Selatan 12550 Tlp: 29392999 Fax: 7804415

CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1), South Tower, Lantai 2, Zone 9, JI Grand Boulevard, BSD Green Office Park, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15345 Tlp: (021) 29775800

•••••• CENTRAL JAVA POWER Summitmas Tower LLt 15 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62, Jakarta 12190 Tlp: 520 5041 Fax: 520 2474

> CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA Menara Astra Lantai 25 Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Jakarta 10220 Tlp: 30404080 Fax: 30404081

CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING Gedung TMT 1 Lt.6, Jl. Cilandak KKO Rava No. 1 Jakarta 12560 Tlp: 299 76650 Fax: 299 76651 www.csulfinance.com

CIMB NIAGA FINANCE

CIMB NIAGA AUTO FINANCE Jalan Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15 Bintaro Jaya Sektor IX, Kel. Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan 15229 Telp. (021) 2788-1800

•••••

CIPTADANA MULTIFINANCE Plaza ASIA, Office Park 2-3, II. Jend Sudirman Kay 59. Jakarta 12190 Tlp: 255 74800 Fax: 255 74900, 514 01020

CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH JI.R.S. Fatmawati No.29. Jakarta Selatan 12430 Telp: 021-7650222, 7662044 Fax: 021-7661337 ••••••

CLEMONT FINANCE INDONESIA Wisma Korindo 2nd Floor Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780 Tlp: 797 6363 Fax: 797 6371, 797 6368 www.clemontfinance.co.id

ClipanFinance

CLIPAN FINANCE INDONESIA Gedung Wisma Slipi Lt. 6, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 12. Jakarta Barat 11480 Tlp: 530 8005 Fax: 530 8026/27 Website: www.clipan.com

COMMERCE FINANCE

Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 28, Tower A Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 Tlp: 80864285

•••••

DAINDO INTERNASIONAL FINANCE JI. KH Hasyim Ashari No. 35A Lt. 5 Jakarta Pusat 10150 Tlp: 6323308 Fax: 6323307

••••• DANAREKSA FINANCE

Gedung Plaza BP Jamsostek Lt. 12 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 112 Blok B, Jakarta 12910 Tlp: 29555777 Fax: 3522495

••••• DANASUPRA ERAPACIFIC

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place, SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telp: 51401157 Fax: 51401159

•••••• DANA LINICO FINANCE

Gedung Dana Paint Lt.2, Jl. Pemuda Ujung, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250 Tlp: 29847799 Fax: 29834903



DIPO STAR FINANCE

Sentral Senayan II LT.3. Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta Tlp: 579 54100 Fax: 579 74567

> FRIZ CIPTA SOLUSI Metropolitan Tower Lt. 13 Unit E, JL. RA Kartini Kav. 14, Jakarta 12430 Tlp: 29182939 Fax: 29182941

EMPEROR FINANCE INDONESIA Gedung Graha BIP, Lantai Mezzanine Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 Tlp: 29660826 Fax: 29660816

EQUITY FINANCE INDONESIA

Wisma Hayam Wuruk Lt. 8, Jl. Hayam wuruk No.8 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10120 Tlp: 80632888

> FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Menara FIF, JI TB Simatupang Kav. 15 Cilandak Barat, Jakarta 12430 Tlp: 769 8899 Fax: 7590 5599 Website: www.fifgroup.co.id

•••••

FINACCEL FINANCE INDONESIA Dipo Tower, Lantai 3 Unit A-B. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10260 Telp: 021-22055677

••••• FORTUNA MULTI FINANCE

Jalan Sultan Syahrir Abdurahman No. 1A Gedung Aneka Pavilion Lt.5, Pontianak TIp: Fax:

FUJI FINANCE INDONESIA Menara Sudirman Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kay.60. Jakarta 12190 Tlp: 5226509 Fax: 5226517

GENIE MULTI FINANCE Gowork Menara Rajawali JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan. Jakarta 12950

GLOBALINDO MULTI FINANCE Gedung Victoria Lantai 3 Unit 305 Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51 lakarta Selatan Tlp: 7396949

GROUP LEASE FINANCE INDONESIA Jl. Cideng Barat No. 23B RT/RW 12/01, Cideng, Gambir Jakarta Pusat 10140 Tlp: 6312194 Fax: 22636302

••••• HASIRAT MULTIFINANCE Jl. R.P. Soeroso 38, Jakarta 10350 Tlp: 390 5912-14, 390 0719. Fax: 314 0609, 390 4114 •••••

HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA Prudential Centre, Kota Casablanca Level 9 unit A-H II Casablanca Kay 88 Jakarta Selatan 12870. Tlp: 29639999

> HEXA FINANCE INDONESIA Ged. Atrium Mulia, Lt. 2 Suite 205, JI. HR Rasuna Said Kav. B 10-11 Jakarta Selatan 12910 Tlp: 29039510 Fax: 29039511

HITACHI CAPITAL FINANCE INDONESIA Atria@Sudirman 18th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 Tlp: 5739339 Fax: 5739949

•••••

HINO FINANCE INDONESIA Indomobil Tower Lt. 17, Jl. MT. Haryono Kav. 11 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur Tlp: 29827960 Fax: 29827961

HOME

HOME CREDIT INDONESIA Plaza Oleos Lantai 8 & 9 Jl. TB. Simatupang No. 53A. Jakarta 12520, Indonesia Telp: +62 21 295 39655 Fax: +62 21 227 80155

IFS CAPITAL INDONESIA Rukan Cordoba Blok G No. 37 Jl. Marina Raya — Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara Tlp: 22573029 Fax: •••••



INDOCYBER GLOBAL TEKNOLOGI Sampoerna Strategic Square, South Tower Lantai 18 II. lend Sudirman Kay 45-46 lakarta Selatan Tlp: 5663705 Fax: 5663704

••••••

INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE Gedung Office 8 Lt 16 Unit G. H. Jend Sudirman Kay, 52-53, Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190 Tlp: 2933 3811 Fax: 2933 3810

> INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Indomobil Tower Lantai 8 Jl. MT. Harvono Kav.11. Jakarta 13330 Tlp: 29185400 Fax: 29185401

INDOSURYA INTI FINANCE Indosurva Center 10th Floor Jl. M. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat 10110 Tlp: 3890 9021 Fax: 3890 0102



INOVASI MITRA SEJATI Jl. Cideng Timur Raya No. 86A Jakarta Pusat 10160 Tlp: 3456852 Fax: 3456934 ••••••

INTAN BARUPRANA FINANCE INTA Building 1st Fl Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta 14130 Tlp: 440 1408 Fax: 440 8441

> INTI ARTHA MULTIFINANCE Grand Slipi Tower Lt. 11. II S Parman Kay 22-24 Jakarta Barat 11480 Tlp: 29865829/39 Fax: 29865837

INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Gunung Sahari Raya Komp, Ruko Mangga Dua Square Blok E. 19-20, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14430 TIp: 6251900 Fax: 6252900

•••••

ITC AUTO MULTI FINANCE Lantai 21 Gama Tower, Jl. HR Rasuna Said Kavling C 22, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Tlp: 22057027 Fax: 22057045

JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE Lippo Kuningan 25th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B-12 Kuningan, Jakarta 12940 Tlp: 2971 0100 Fax: 2911 0313

> JELAS KARYA WASANTARA (VERI JELAS) Jl. Bangka Raya No. 21, Pela Mampang Jakarta Selatan 12720 Tlp: 22718620



JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Jl. Pecenongan Raya No. 45, Jakarta Pusat 10120 Tlp: 352 2238 Fax: 384 2104

KARYA TECHNIK MIJITIFINANCE Jl. Kali Besar Barat No. 37, Jakarta 11230 Tlp: 691 0382 Fax: 691 6267

KARIINIA MIJITIFINANCE

Graha Anabatic Lt. 10, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2, Summarecon Serpong, Tangerang 15811 Tlp: 80636000 Fax: 80636001 ••••••

KB FINANSIA MULTI FINANCE SCBD LOT 28 OFFICE 8 LT. 15. JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, JAKARTA 12190, TLP: 2933 3646 FAX: 2933 3648 WEBSITE: WWW.FINANSIA.COM

KDB TIFA FINANCE

Equity Tower Lt. 39, SCBD Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 lakarta Selatan 12190 TIp: 021-50941140

KOFXIM MANDIRI FINANCE

Equity Tower Lt. 50 Suite 50E SCBD Lot. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru lakarta Selatan 12190 Tlp: 021-51400777

KOMATSII ASTRA FINANCE

United Tractors Head Office Wing Area 6th Floor, Jalan Raya Bekasi KM 22 Tlp: 4605948 Fax: 4605954

Plaza ABDA Lantai 28.

.....

Jl. Jend Sudirman Kav. 59. Jakarta Pusat 12190 Tlp: 514 01725-27 Fax: 514 01728

> LOTTE CAPITAL INDONESIA Wisma Keiai 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.3. Jakarta Tlp: 572 4255 Fax: 572 4256

MANDALA MULTI FINANCE Jl. Menteng Raya No. 24 A-B Jakarta Pusat 10340 TIn: 2925 9955 Fax: 2925 9961 Website: www.mandalafinance.com

MANDIRI FINANCE INDONESIA WISMA AMG, Jl. RS Fatmawati No. 29 Jakarta Selatan 12430 Telp: 750 9165 Fax: 750 9163 Website: www.mandirifinance.com

MANDIRI TUNAS FINANCE Graha Mandiri Lantai 3A. Jl. Iman Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310 Tlp: 230 5608 Fax: 230 5618 Website: www.mtf.co.id



•••••

MANDIRI LITAMA FINANCE Plaza BAPINDO Menara Mandiri Lantai 26-27, Jl. Jend Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan Tlp: 5278038 Fax: 5278039



MAYBANK INDONESIA FINANCE Gd. Wisma Eka Jiwa Lt.10, Jl. Mangga Dua raya. Jakarta Pusat 10730 Tlp: 623 00088 Fax: 623 00099

.....

MAXIMA INTI FINANCE Karawaci Office Park Blok A9 Lippo Karawaci Tangerang 15811 Tlp: 5533555 Fax: 5535171

••••• MEGA FINANCE

Jl. Wijaya I No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Tlp: 728 00818 Fax: 728 00978

MEGA AUTO FINANCE

Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76 Slipi, lakarta Barat 11410 Tlp: 536 66627/28 Fax: 536 66697/98 ••••••

MEGA CENTRAL FINANCE Wisma 76 Lt. 12 Jl. Let. Jend. S. Parman Kay. 76 Slipi. Jakarta Barat 11410 Tlp: 536 66627, 536 66628 Fax: 536 66698

MITRA DANA TOP FINANCE Gedung Top Center JI. KH Hasyim Ashari No. 13-13A Jakarta Pusat. TIp: 638 66017/18 Fax: 021-6307273

MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE INDONESIA Mid Plaza 2 Building, lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta 10220 Telp. 573 5905 Fax. 573 5906

.....

MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE Gedung Graha Deka JI. Raya Kranggan No.120 RT 03 RW 006, Kelurahan Jati Raden, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat TIp: TIp: 84596099 Fax: •••••

MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Plaza Bank Index Lt. 11. Jl. MH Thamrin No. 57. Gondangdia, Menteng. Jakarta Pusat 10350 Tlp: 3903238 Fax: 3903245 Website: www mitsuilease co id

••••• MNC FINANCE

MNC Financial Center Building 12th Floor, Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340 Tlp: 2970 1111 Fax: 3929938 ••••••

MNC GUNA USAHA INDONESIA (MNC LEASING) MNC Tower Lt 23 II Kehon Sirih No. 17-19 Kehon Sirih Jakarta Pusat 10340 Tlp: 3910993 Fax: 3911093

> MULTINDO AUTO FINANCE Jl. Pandanaran No. 119A, Semarang 50243 Tlp: (024) 8311130 Fax: (024) 8445254, 8445650

MUTIARA MULTI FINANCE Aldeoz Building Lt.5, Jl. Warung Bucit Raya No.39, Kec.Pancoran Jakarta Selatan 12740 Tlp: 27534112 Fax: 27534494

NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA South Quarter Tower C Lantai 16 Unit A-L JI. RA Kartini Kav. 8 RT/RW 010/004 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan Tlp: 80670388

•••••



NUSA SURYA CIPTADANA Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kel. Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat Tlp: 568 5000/3520504 Fax: 564 7732



ORICO BALIMOR FINANCE Graha 137 Lt 7, Jl. Pangeran Jayakarta No. 137 Jakarta. Tlp: 639 3877 Fax: 628 7950

> ORIX INDONESIA FINANCE Wisma Keiai, 24th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 3, Jakarta Tlp: 572 3041 Fax: 572 3074

OTOMAS MULTI FINANCE Komp. Dutamas Fatmawati Blok B.1 No. 25-26, Jl. Raya Fatmawati No. 39, Jakarta 12150 Tlp: 722 0279 Fax: 722 0881

> OVO FINANCE INDONESIA Jl. Lippo Kuningan Lt. 17 Unit D JI. HR Rasuna Said Kav B-12 Jakarta 12940

••••••

OTO MULTIARTHA Gedung Summitmas II, Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav.61-62, Jakarta Tlp: 522 6410 Fax: 522 6424 Website: www.oto.co.id

PACIFIC MULTI FINANCE Gedung Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 12A Jl. Jenderal Gatot Subroto No.38 Jakarta 12710 TIp: 39506144

•••••

PANN PEMBIAYAAN MARITIM Gedung PT. PANN, Jl. Cikini IV No. 11 Jakarta Pusat Tlp: 3192 2003 Fax: 3192 2980

••••••

PARAMITRA MULTIFINANCE Kompleks Simprug Gallery. Jl. Teuku Nyak Arief No.10-R. Jakarta 12220 Tlp: 727 87845 Fax: 727 87846 Website: www.pmf.co.id

PEFINDO BIRO KREDIT Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 TIn: 5154501

PERMATA FINANCE INDONESIA Gedung Waringin Group Lantai 3 Jl. Kesehatan No 22. Jakarta Pusat 10150 Tlp: 3867319 Fax: 3867321

••••••

POOL ADVISTA FINANCE Jl. Soepeno Blok CC6 No.9-10, Arteri Permata Hijau, Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Tlp: 80626300

PPA FINANCE

Gedung Plaza BP Jamsostek, Lantai 10 Jl. HR Rasuna Said Kavling 112 Blok B, Jakarta 12940 Tlp: 021 - 5798 2255 Fax: 021 - 5798 2266

> PRATAMA INTERDANA FINANCE Wisma SMR Ground Fl. Jl. Yos Sudarso, Kav. 89. Jakarta 14350 Tlp: 650 2222 Fax: 650 8141

Menara Sentraya Lt.15 Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Tlp: 27882088 Fax: 27882084

PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE

PROLINE FINANCE INDONESIA Plaza Asia Lt. 8A Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta Selatan 12190 Tlp: 51401260 Fax: 51401267

RABANA INVESTINDO Jl. Tomang Raya No. 48A, Jakarta 11430 Tlp: 566 9808-10 Fax: 567 1646, 566 9820

.....

RADANA BHASKARA FINANCE CIBIS Nine Building 11th Floor Suite W-16, JI TB Simatupang No. 2 RT001/RW005, Jakarta 12560 Tlp: 50503333

RAMA MULTI FINANCE Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2DE Jakarta Selatan 12790 TIp: 7996345 Fax: 7996445

.....

.....

REKSA FINANCE Ruko Patal Senayan Jl. Tentara Pelajar Rukan Permata Senayan Blok B No. 3 & 5, Grogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

RESONA INDONESIA FINANCE Menara Mulia Building 7 Fl Suite 701 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930 Tlp: 570 1956 Fax: 570 1961

•••••

RIDEAN FINANCE Jl. Pemadam Kebakaran No. 11, Jakarta Pusat 10410 Tlp: 633 1032, 633 2027 Fax: 633 1032

•••••• RINDANG SEJAHTERA FINANCE Gedung Jaya Lt. 3, Jl. MH Thamrin No. 12. Jakarta. Tlp: 2300919 Fax: 2300919

SAHABAT FINANSIAL KELUARGA Metropolitan Tower 3rd Floor, JI. RA Kartini-TB Simatupang Kav. 14, Jakarta Selatan 12430 Tlp: 27652022 Fax: 27652023

SAISON MODERN FINANCE Menara Rajawali Lantai 10 JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Tlp: 57950571 •••••

SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA AXA Tower Lt.32 Suite 03, Kuningan City Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setia Budi Jakarta Selatan 12940 Tlp: 30480655 Fax: 30480755

•••••

SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28, Surabava 60271 Tlp: (031) 9900-4250 Fax: (031) 9900 4254

••••• SGMW MULTIFINANCE INDONESIA

Sinarmas MSIG Tower Lt. 43 Jl. Jend Sudirman Kav. 21. Jakarta Tlp: 22535050 Fax:

SHAKTI TOP FINANCE Gedung Top Center Jl. KH Hasyim Ashari No. 13-13A, Jakarta Pusat Tlp: 63866017 Fax: 6306880 •••••

SHARIA MULTIFINANCE ASTRA Gedung Menara FIF Lt.3 Suite 303 Jl. TB Simatupang, Lebak Bulus. Jakarta Selatan Tlp:7698899 Fax:75905599

SHINHAN INDO FINANCE Wisma Indomobil I Lt. 10. Jl. MT. Haryono, Kav. 8, Jakarta 13330 Tlp: 857 9095 Fax: 857 4171 •••••

.....

SINARMAS HANA FINANCE Gedung Roxy Square Lt. 3 Blok B 01 No. 2. Jakarta Barat 11440 Tlp: 56954670 Fax: 56954678



SINAR MITRA SEPADAN FINANCE Gedung Agro Plaza Lt. 17 JI. HR Rasuna Said Blok X-2 No.1 Kuningan Timur, Setiabudi. Jakarta Selatan 12950 TIp: 80864900 Fax: 80864950

•-----

SINARMAS MULTIFINANCE Gedung Sinartama Gunita Lantai 3, Jl. Lombok No. 71, Menteng. Jakarta Pusat 10350 Tlp: 319 02888 Fax: 319 03589

SMART MULTI FINANCE JI. BSD Boulevard Utara, Foresta Business Loft 6 No. 20-21, BSD, Kab.Tangerang, Prov.Banten, 15331 Tlp: (021) 3972 1010, 3972 5050

.....

SMFL LEASING INDONESIA

Menara BTPN Lt.31, Jl. Dr. Ide. Agung Gde Agung, Kav. 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Tlp: 80628710 Fax: 80628719

SUMMIT OTO FINANCE

Summitmas II. 8th Floor, II. lend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190 Tlp: 252 2788, 522 6601 Fax: 252 6388 Website: www.otofinance.co.id

•••••• SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE

Jl. Sahid Sudirman Center Lantai 50 Unit A dan E. Jalan Jend, Sudirman No.86 Jakarta Pusat 10220

••••• SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE

18 Office Park Lantai 23 Jl. TB Simatupang No. 18. Jakarta 12520 Tlp: 781 7555 Fax: 781 9111,788 47224

SUZUKI FINANCE KREDIT RESMI SUZUKI

SUZUKI FINANCE INDONESIA Jl. Raya Bekasi Km 19, Pulogadung Kel. Rawa Terate, Kec. Cakung Jakarta Timur 13920 Teln: (021) 8060 7000

SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE

Jl. TB Simatupang No. 90 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 Tlp: 788 59000 Fax: 788 51220 Website: www.autocybercenter.com

•••••• TAKARI KOKOH SEJAHTERA

Jl. Arjuna Utara No. 131, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Tlp: 564 0101 Fax: 560 3550

••••• TEMPO UTAMA FINANCE

Tempo Scan Tower Lt. 3 Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan Tlp: 29667879

TEZ CAPITAL AND FINANCE Equity Tower Lt. 29,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tlp: 50666206

TIRTA FINANCE

Pacific Century Place, It 17, JI Jend Sudirman Kay 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Tlp: 50847818

••••• TOPAS MIJITI FINANCE

Mayapada Tower 2, Lantai 14 unit 01A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 27, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Tlp: 2524433

..... TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

The Tower Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 12. Jakarta Selatan 12930 Tlp: 50821500 Fax: 50821501

••••• TRANSPACIFIC FINANCE

Perkantoran Grogol Permai Blok G24 Jl. Prof. Dr. Latumenten Grogol, Jakarta 12980 Tlp: 5010 2222 Fax: 567 9406

..... TRIHAMAS FINANCE

Trihamas Building, Jl. TB Simatupang Kav. 11, Tanjung Barat, Jakarta 12530 Tlp: 2933 0533 Fax: 2933 0543/44

TRIHAMAS FINANCE SYARIAH

Trihamas Building Lt. Dasar Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav.11 Tanjung Barat, Jakarta 12530 Tlp: 29330530 Fax: 29330529

TRIPRIMA MIJI TIFINANCE

Jl. Joglo Raya No. 17B, RT.007 RW.003 (Sebelah Biznet Pos Pengumben) Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11630 Telp: 22959040 Fax: 22959041

TRUST FINANCE INDONESIA

Gedung Artha Graha Lt. 21. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Tlp: 515 5477 Fax: 515 5484

..... II FINANCE INDONESIA

Atria @Sudirman Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220 Tlp: 5711 109 Fax: 573 1139 Website: www.ufinance.co.id

..... USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA

Menara Batavia Lt. 27 JI. K. H. Mas Mansyur Kav 126 Jakarta Tlp: 5793 0008 Fax: 5793 0028

VARIA INTRA FINANCE

Asean Tower Jl. KH. Samanhudi No.10 lt. 7. Jakarta 10710 Tlp: 380 2865 Fax: 384 1015



A Group of Mizuho Leasing

VERENA MULTI FINANCE Gedung Bank Panin Lt. 3,

Jl. Pecenongan no. 84, Jakarta Pusat 10120 Tlp: 350 4890 Fax: 350 4891

••••• WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Altira Office Tower

Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter Jaya, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350 Tlp: 21882400 Fax: 21882420

WOKA INTERNATIONAL

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 38, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Tlp: 315 7501; 392 1358 Fax: 319 02809

Bagi anggota APPI yang ingin mencantumkan logo perusahaan harap menghubungi sekretariat APPI di No. Telp: (021) 2982 0190 atau email: sekretariat@ifsa.or.id

upcoming event

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi: Sekretariat APPI

Kota Kasablanka

(EightyEight@Kasablanka) Tower A Lantai 7 Unit D

Telp: (62-21) 2982 0190, Fax: (62-21) 2982 0191, Email: sekretariat@ifsa.or.id



Asset Registry System v3C





ANGSURAN LEBIH MURAH